

PELUANG DAN TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI KEMISKINAN DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN BARAT DENGAN MALAYSIA

Arini Mayang Fauni

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Email: 05010422005@student.uinsby.ac.id

Elvina Aurelia A.P.M

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Email: 05010422007@student.uinsby.ac.id

Imaniar Dwi Iswandani

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Email: 05010422009@student.uinsby.ac.id

Nasywa Salma

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Email: 05010422014@student.uinsby.ac.id

Naskah dikirim 11/06/2024, direvisi:27/07/2024, diterima: 10/11/2024

Abstract:

This article discusses the problem of poverty that often occurs especially in the border areas of Indonesia. Poverty reduction is one of the main priorities of development in Indonesia, in accordance with the Millennium Development Goals (MDGs) set by the United Nations. The law also regulates the basic rights for the poor to obtain basic needs. However, poverty still has far-reaching impacts, such as limited access to health, education, employment, social security, and family protection. In the field of education, local governments must allocate a budget of 20% as mandated by law, because education is a long-term strategic measure to reduce poverty. In addition, the government should also apply entrepreneurial principles of governance, such as catalytic, results-oriented, and market-oriented government, to increase people's income. Poverty in Indonesia's border areas, particularly in the Indonesia-Malaysia border region in West Kalimantan, is a complex social and economic problem. Poverty in border areas is generally more severe than poverty in urban areas, due to factors such as limited access to education, health, infrastructure, and decent employment. Addressing poverty in border areas requires a comprehensive approach that involves the central government, local governments, private investors, and local communities. Efforts that can be made include providing better access to basic services, improving the quality of education and health, building adequate infrastructure, and creating productive and sustainable jobs. A case study in Jagoi Babang, West Kalimantan shows the existence of socio-economic disparities that have an impact on the rise of illegal activities such as human trafficking due to limited border supervision. In this study using normative juridical research methods, the normative juridical approach focuses on analyzing

laws, regulations, and policies related to poverty issues in border areas, as well as using library research which is carried out using literature (literature) in the form of books, notes and reports on the results of research Government Policy Analysis The author can review and evaluate the policies of the central and regional governments related to poverty management in border areas.

Keywords: *regional poverty, border areas*

Abstrak

Artikel ini membahas permasalahan kemiskinan yang sering terjadi terutama di daerah perbatasan Indonesia, Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan di Indonesia, sesuai dengan Millenium Development Goals (MDGs) yang ditetapkan PBB. Undang-Undang juga mengatur hak-hak dasar bagi fakir miskin untuk memperoleh kebutuhan pokok. Namun, kemiskinan masih berdampak luas, seperti keterbatasan akses terhadap kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, jaminan sosial, dan perlindungan keluarga. Hal ini juga mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan, Dalam bidang pendidikan, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran sebesar 20% sesuai amanat undang-undang, karena pendidikan merupakan langkah strategis jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan. Selain itu, pemerintah juga harus menerapkan prinsip-prinsip wirausaha pemerintahan, seperti pemerintah yang katalis, berorientasi hasil, dan berorientasi pasar, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemiskinan di daerah perbatasan Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat, merupakan masalah sosial dan ekonomi yang kompleks. Kemiskinan di daerah perbatasan umumnya lebih parah dibandingkan dengan kemiskinan di perkotaan, disebabkan oleh faktor-faktor seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lapangan kerja yang layak. Penanganan kemiskinan di daerah perbatasan membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, investor swasta, serta masyarakat setempat. Upaya yang dapat dilakukan antara lain menyediakan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, membangun infrastruktur yang memadai, serta menciptakan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan. Studi kasus di Jagoi Babang, Kalimantan Barat menunjukkan adanya kesenjangan sosial-ekonomi yang berdampak pada maraknya aktivitas ilegal seperti human trafficking akibat terbatasnya pengawasan perbatasan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif Pendekatan yuridis normatif fokus pada analisis hukum, peraturan, dan kebijakan terkait isu kemiskinan di daerah perbatasan, serta menggunakan Penelitian Kepustakaan (library research) yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil dari penelitian Analisis Kebijakan Pemerintah Penulis dapat mengkaji dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan penanganan kemiskinan di wilayah perbatasan.

Kata kunci: kemiskinan daerah, daerah perbatasan

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan kondisi Dimana seseorang merasa tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan dasar yang berupa kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, dan kebutuhan papan yang mana itu merupakan kebutuhan penting sebagai manusia, jika salah satunya tidak terpenuhi menyebabkan timbulnya ketidak setaraan antar Masyarakat.

Parahnya lagi kemiskinan bisa menyebabkan hilangnya hak akan Pendidikan, hak akan Kesehatan, hak akan perlindungan hukum dan hak atas rasa aman, tersingkirnya berbagai hak tersebut menyebabkan terbatasnya memperoleh akses pelayanan umum dan terbatas dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi sehingga berpotensi tinggi tertinggal oleh Masyarakat yang lebih mampu dalam berbagai aspek ekonomi.

Kemiskinan yang terjadi merupakan suatu masalah social dan ekonomi yang rumit dan sangat memerlukan perhatian khusus dari berbagai macam pihak berwenang dan berwajib yaitu pemerintah. Di Indonesia sendiri kemiskinan daerah merupakan isu yang sangat esensial melihat negara ini terdiri dari berbagai wilayah dengan karakteristik yang berbeda-beda baik, dari segi geografi, demografi, ataupun ekonomi. Dilihat dari karakteristiknya kemiskinan di daerah terlihat lebih parah dari pada kemiskinan di kota, banyak faktor yang mempengaruhinya diantaranya ialah faktor keterbatasan akses Pendidikan, Kesehatan, infrastuktur, dan kesempatan kerja yang layak diterima.¹

Terdapat dua kategori utama yang menjadi penyebab kemiskinan, kategori pertama merupakan kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang timbul akibat sumber daya yang langka jumlahnya baik dari segi manusia atau alam, dan Tingkat perkembangan teknologi yang terbilang rendah. Yang dimaksudkan ialah factor-faktor yang alami timbul dari Masyarakat bukan terjadi karena kelompok atau individu tertentu dalam Masyarakat tersebut. Yang kedua adalah faktor kemiskinan buatan yang disebabkan Masyarakat social tidak menguasai sarana fasilitas yang ada secara merata.

Penanganan kemiskinan daerah sangat memerlukan pendekatan yang universal dan menyeluruh dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, investor swasta, dan penduduk Masyarakat itu sendiri. Adapun Upaya yang dapat dilakukan ialah menyediakan akses yang jauh lebih baik terhadap pelayanan dasar, peningkatan kualitas umum seperti Pendidikan

¹ Fadel Muhammad and Mahmudi Mahmudi, "Tantangan Dan Peluang Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan," *Unisia* 29, no. 59 (2006): 9, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol29.iss59.art7>.

dan Kesehatan, Pembangunan infrastruktur yang lengkap, serta menciptakan banyak lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan secara merata di setiap titik daerah.

Salah satu kemiskinan yang sampai saat ini masih berkelanjutan di salah satu daerah Indonesia adalah kemiskinan di daerah perbatasan yaitu Kalimantan barat tepatnya di perbatasan Indonesia- Malaysia di Jagoi Babang Kalimantan Barat masih banyak terdapat kesenjangan baik kesenjangan social dan kesenjangan ekonomi, yang lebih memicu permasalahan ialah kurangnya keefektifan sumber daya manusia yang menyebabkan banyak akses masuk pekerja ilegal dan berbagai praktik *human trafficking* (perdagangan manusia). Keterbatasan akses sarana dan prasarana di Kalimantan barat ini menyebabkan sulitnya terdeteksi aparat keamanan perbatasan negara *terkait human trafficking* tersebut, banyaknya jalur tikus yang tersembunyi menjadi faktor utamanya baik berupa barang ilegal karena mudah di perbatasan ataupun penyelundupan manusia.²

B. Pembahasan

B.1 Pengertian dan Faktor-faktor yang Menyebabkan Tingginya Kemiskinan di Daerah Perbatasan

Kemiskinan merupakan masalah yang sering dihadapi oleh seluruh negara terutama di negara berkembang seperti di Indonesia ini. Kemiskinan di Indonesia sudah menjadi topik yang berkepanjangan dimulai dari masa penjajahan Belanda hingga masa sekarang yaitu masa modern ini. Kemiskinan adalah keterbatasan yang dipikul oleh seseorang, keluarga maupun negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan.³ Kemiskinan dibagi menjadi empat bentuk, yaitu :

- a. Kemiskinan relatif adalah pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mencapai seluruh masyarakat, sehingga dapat menyebabkan ketimpangan pada penghasilan atau pendapatan.

² Anggun and Nur Indah Sari, "Pengaruh Realisasi Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Daerah Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2022," *Ekodestinas* 2, no. 1 (2024): 7, <https://doi.org/10.59996/ekodestinas.v2i1.406>.

³ Gamal Abdul Aziz, Eny Rochaida, and Warsilan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Kartanegara," *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen* 12, no. 1 (2016): 4.

- b. Kemiskinan absolut adalah apabila penghasilannya atau pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi sandang, papan, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
- c. Kemiskinan kultural adalah mengacu pada persoalan sikap masyarakat atau seseorang yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupannya, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun mendapatkan bantuan dari pihak luar.
- d. Kemiskinan struktural adalah keadaan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial politik dan sosial budaya yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Kemiskinan juga dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

- (1) Kemiskinan alamiah, yaitu berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum serta keadaan tanah yang tandus
- (2) Kemiskinan buatan, yaitu diakibatkan oleh sistem modern atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.⁴

Kemiskinan juga dianggap menjadi permasalahan sosial yang sulit diselesaikan apabila tidak dapat menemukan akar permasalahannya dan tidak segera diatasi. Permasalahan kemiskinan menjadi dominan pada masyarakat di kawasan perbatasan. Daerah perbatasan seperti perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia juga mengalami masalah kemiskinan. Beberapa faktor yang mempengaruhi wilayah perbatasan Malaysia dengan Kalimantan Barat khususnya daerah Jangoi mengalami kemiskinan adalah :

1. Sumber Daya Manusia Rendah

Rendahnya pendidikan dan juga keterbatasan fasilitas pendidikan menjadi salah satu penyebab kemiskinan. Karena akibat dari rendahnya pendidikan ini dapat mengurangi atau menjadi rendah kualitas sumber daya

⁴ Chriswardani Suryawati, "MEMAHAMI KEMISKINAN SECARA MULTIDIMENSIONAL," *Proceedings - European Aviation Safety Seminar, EASS 08*, no. 03 (2010): 2.

manusia. Apabila rendahnya pendidikan maka masyarakat cenderung tidak memiliki keterampilan untuk mengelola sumber daya alam secara optimal yang seharusnya sumber daya alam tersebut memiliki manfaat yang sangat besar untuk memakmurkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Kurangnya guru untuk kegiatan ngajar mengajar serta kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai di daerah perbatasan seperti Kalimantan Barat juga dapat menghambat sumber daya manusia.⁵

2. Faktor Sumber Daya Alam

Sebagian negara berkembang seperti di Indonesia bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi apabila sumber daya manusianya tidak mendukung dalam mengelola sumber daya alam.

3. Tingginya Angka Pertumbuhan Penduduk

Faktor dari tingginya pertumbuhan penduduk juga menjadi penyebab kemiskinan. Angka kelahiran yang tinggi di daerah perbatasan mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk di negara Indonesia. Sehingga lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi terbatas untuk masyarakat.

4. Masyarakat Pengangguran Meningkat

Faktor masyarakat pengangguran meningkat tentu menjadi penyebab kemiskinan. Akibat dari meningkatnya pertumbuhan penduduk dan terbatasnya lapangan pekerjaan serta pendidikan yang rendah sehingga masyarakat menjadi pengangguran.⁶

5. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat juga dapat menyebabkan kemiskinan. Karena lapangan pekerjaan untuk manusia tergantikan dengan mesin-mesin yang canggih sehingga lapangan pekerjaan untuk manusia menjadi rendah.

⁵ Nikodemus Niko, "kemiskinan sebagai penyebab strategis praktik human trafficking di kawasan perbatasan jagoi Babang (INDONESIA-MALAYSIA) KALIMANTAN BARAT," 2016, 8.

⁶ Ervin Nora Susanti and Sartiyah Sartiyah, "Determinan Kemiskinan Di Provinsi Kepulauan Riau," *Jurnal Dimensi* 8, no. 2 (2019): 4, <https://doi.org/10.33373/dms.v8i2.2156>.

6. Kebijakan Pemerintah yang Tidak Optimal

Kurangnya perhatian dari pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah perbatasan dapat menyebabkan ketimpangan pembangunan. Prosedur administrasi yang rumit dan tidak mendukung usaha lokal juga dapat menyebabkan kemiskinan.⁷

Dampak dari kemiskinan di daerah perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia juga dapat dirasakan oleh perempuan dan anak, terutama di daerah perdesaan. Berbeda halnya dengan perkotaan yang dimana di perkotaan penyebab kemiskinannya adalah rendahnya keterampilan, sedangkan di daerah perbatasan seperti perdesaan dikarenakan rendahnya sumber daya baik sumber daya alam dan sumber daya manusia. Akibat dari kondisi tersebut dapat membelenggu mereka untuk tetap berada dalam garis kemiskinan. Sehingga perempuan-perempuan dan anak-anak ikut menanggung kemiskinan yang membelenggu keluarga mereka.

Anak-anak juga ikut serta membantu finansial keluarga, dan bahkan mereka menjadi tulang punggung keluarga mereka. Sehingga mereka banyak yang pada akhirnya memutuskan sekolah untuk membantu finansial keluarga mereka. Karena kondisi seperti itu mereka pada akhirnya bekerja di Malaysia di usia masih dibawah umur. Kemiskinan membawa mereka kepada pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, ada sebagian juga menjadi korban perdagangan manusia, bahkan menjadi pelayan nafsu para lelaki. Tidak menutup kemungkinan mereka mengalami kekerasan dalam bekerja, kekerasan seksual dan eksploitasi.

Banyak dari mereka ketika pulang kampung halaman dalam keadaan hamil, meskipun masih belum cukup umur. Mereka melahirkan anak tanpa adanya suami yang mendampingi mereka. Kemudian setelah mereka melahirkan anak tersebut, anak mereka akan ditinggalkan bersama dengan keluarga lainnya dan berangkat kembali untuk bekerja ke Malaysia. Kasus-

⁷ El Adawiyah, "Kemiskinan_Dan_Penyebabnya" 1, no. April (2020): 4.

kasus seperti ini menjadi hal biasa dan lumrah bagi masyarakat daerah perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia. Mereka tidak menyadari bahwa adanya eksploitasi terhadap tubuh mereka sendiri. Minimnya pengetahuan dan rendahnya pendidikan serta kemiskinan yang membawa mereka untuk terjun ke dalam dunia tersebut.

Kasus-kasus *trafficking* yang terjadi di daerah perbatasan, kemiskinan lah yang menjadi cikal bakal penyebabnya. Karena kemiskinan yang seakan-akan telah membeleggu mereka sehingga mereka seakan-akan secara suka rela untuk mengorbankan diri demi keluarga mereka atau untuk memperbaiki perekonomian keluarga atau adanya budaya balas jasa orang tua. Dari kasus-kasus ini negara juga masih belum hadir ditengah-tengah kehidupan mereka yang masih terisolasi. Faktor pembangunan yang tidak bersperspektif gender juga ikut menjadi penyebab kemiskinan perempuan di perdesaan.

Perempuan di daerah perbatasan ini masih belum memiliki kesejahteraan, kemiskinan masih melilit kuat dalam setiap kehidupan mereka. Membicarakan pembangunan perbatasan, bukan persoalan membicarakan infrastruktur semata, melainkan bagaimana mensejahterakan kaum wanita, memberdayakan perempuan dan membuka akses pendidikan bagi perempuan di daerah perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia.⁸

B.2 Tantangan Pemerintah Daerah dalam Menangani Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan saat ini menjadi hal serius bagi pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat, kemiskinan sudah menduduki urutan pertama pada *Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah ditetapkan oleh PBB, karena Indonesia menjadi salah satu dari beberapa negara yang ikut dalam kegiatan MDGs tersebut.⁹ Dalam Undang-undang Pasal 3 No 13 Tahun 2011 yang membahas mengenai Fakir Miskin menjelaskan bahwasannya fakir miskin mempunyai hak untuk memperoleh kecukupan pangan, sandang, papan, memperoleh pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan, mendapatkan perlindungan serta pelayanan sosial,

⁸ Rupita Rupita, "Kehidupan Perempuan Perbatasan: Kemiskinan Dan Eksploitasi (Kajian Kasus Di Perbatasan Jagoi Indonesia-Malaysia Kalimantan Barat)," *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2020): 7, <https://doi.org/10.37329/ganaya.v3i1.429>.

⁹ Motic Deviano Novandric, "Implementasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan" 2, no. 3 (2014): 20.

memperoleh derajat hidup yang baik, kesejahteraan, memperoleh pekerjaan dan kesempatan untuk berusaha.

Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak yang ada dinegeri ini tidak mendapatkan dan tidak merasakan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, kurangnya tabungan sehingga menimbulkan tidak adanya tabungan atau investasi dimasa depan, kurangnya pelayanan publik yang memberikan akses kepada masyarakat, kurangnya lapangan pekerjaan dan jaminan sosial, dan kurangnya perlindungan terhadap keluarga, banyaknya urbanisasi ke kota, dan kemiskinan juga menyebabkan keterbatasan rakyat untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan, sehingga masyarakat rela melakukan apa saja untuk mempertahankan hidupnya. Dalam hal ini, stabilitas ekonomi juga sangat terganggu, oleh karena itu permasalahan kemiskinan harus diselesaikan dengan baik pada tingkat pemerintahan pusat maupun pada tingkat pemerintahan daerah. Untuk itu, untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dibutuhkan banyak peran terutama peran aktif dari pemerintah.¹⁰

Pemerintahan dalam hal ini harus aktif dalam berperan dalam menyelesaikan kemiskinan karena pemerintah berperan sebagai alokasi, distribusi dan stabilitas. Peran pemerintah tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi jika tujuan pembangunan di daerah yaitu penanggulangan kemiskinan dan ingin segera terselesaikan. Anggaran yang telah dikeluarkan untuk menanggulangi kemiskinan merupakan tolak ukur dalam menurunkan angka kemiskinan dan beberapa permasalahan pembangunan lainnya. Dengan ini, pemerintah telah mengeluarkan banyak ide dan pendapat, strategi, kebijakan dan program dalam penanggulangan kemiskinan. Program-program tersebut bukan hanya bertujuan untuk pemerataan penduduk, akan tetapi untuk mengurangi jumlah penduduk miskin pada

¹⁰ Safuridar Safuridar and Novera Dwi Suci, "Analisis Dampak Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Kehidupan Masyarakat Miskin Di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur," *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 2 (2017): 149, <https://doi.org/10.33059/jseb.v8i2.430>.

suatu daerah dengan pemberian harapan baru dalam upaya peningkatan pendapatan.¹¹

Sejauh ini, pemerintah pusat masih sangat dominan dalam melakukan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Hampir semua program kebijakan penanggulangan kemiskinan didesain dan dikembangkan oleh Pemerintah Pusat, sementara itu pemerintah daerah memiliki fungsi lebih sebagai pelaksanaan kebijakan. Pemerintahan daerah dianggap sangat mengetahui mengenai kondisi lokal dibandingkan dengan pemerintah pusat, perlu untuk mengambil peran yang lebih besar dalam mendesain dan mengembangkan kebijakan penanggulangan kemiskinan pada wilayahnya, sehingga pemerintahan daerah memiliki kapasitas untuk melakukan identifikasi penerima program secara lebih akurat, sehingga berperan penting terhadap perbaikan penargetan sasaran program.¹²

Dalam menanggulangi kemiskinan pada wilayah daerah, tentunya pemerintah mengalami berbagai tantangan saat mengerjakannya, pemerintahan juga dihadapkan pada berbagai rintangan kompleks yang menghambat upaya pengentasan kemiskinan., berbagai rintangan tersebut yang **Pertama** ialah, ketimpangan alokasi anggaran. kesenjangan dana antara daerah maju dan tertinggal menjadi hambatan besar. Daerah tertinggal seringkali kekurangan anggaran untuk membiayai program-program pengentasan kemiskinan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini menyebabkan kesenjangan kemiskinan antar daerah semakin lebar.

Pada awal pembangunan ekonomi dari suatu daerah, ketimpangan pembangunan antar wilayah tidak dapat dihindari, karena pembangunan ekonomi yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi yang diukur dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau lapangan usaha pada setiap tahun. Pada dasarnya, peningkatan PDRB dipengaruhi oleh sumber

¹¹ Febriyanty Fajry, "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Maros," Jurnal Ilmu Pemerintahan 11, no. 2 (2018): 65.

¹² Marthalina Marthalina, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten," TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan, 2018, 43, <https://doi.org/10.33701/jt.v10i1.403>.

daya yang dimiliki daerah yang terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya alam, secara lebih rinci diuraikan dalam pemilikan faktor produksi, dalam hal ini meliputi modal, tenaga kerja, tanah dan skill. Semakin besar faktor-faktor produksi tersebut, maka akan semakin besar output yang akan diperoleh yang pada gilirannya akan meningkatkan lapangan pekerjaan.¹³

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, bahwa Indonesia mulai menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi fiskal dan Otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, dengan pemberian kewenangan yang lebih besar dalam mengelola hasil pembangunan daerahnya masing-masing. Adapun salah satunya ialah dengan dana perimbangan, yang merupakan sumber pendapatan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada kepala daerah, terutama peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, yang juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan\kesenjangan pendanaan pada daerah tersebut.¹⁴

Namun hingga saat ini, pengalokasian dana dari daerah pusat ke daerah wilayah selalu mengalami penurunan angka, ketidaktepatan dana yang telah turun mengakibatkan kurangnya perkembangan pengentasan yang kurang merata pada daerah wilayah, hal ini menjadi tantangan yang besar bagi pemerintahan daerah untuk mengentaskan kemiskinan.

Kemudian yang **Kedua** ialah minimnya data kemiskinan yang akurat. Data kemiskinan yang tidak mutakhir dan tidak merata di daerah menjadi kendala dalam penyaluran bantuan yang tepat sasaran Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat miskin yang tidak tersentuh program-program pengentasan kemiskinan, sementara terdapat oknum yang tidak berhak justru mendapatkannya. Dalam hal ini, data kemiskinan sangat dibutuhkan karena akan menjadi data yang tepat sasaran serta efektif pada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan, tanpa adanya data yang akurat, maka pemerintah juga akan mengalami kesulitan untuk membedakan mana

¹³ Muhammad and Mahmudi, "Tantangan Dan Peluang Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan," 8.

¹⁴ Ibid, hlm 7

yang benar-benar membutuhkan bantuan yang sesuai dengan mereka. Selain itu, dengan adanya data tersebut, diharapkan pemerintah untuk adanya evaluasi dalam kemajuan dalam penanggulangan kemiskinan, hal ini diadakan karena untuk memastikan apakah program-program yang dijalankan apakah sudah efektif dan strategis serta apakah sudah mencapai target dengan maksimal.

Yang **Ketiga**, kurangnya partisipasi masyarakat. Pada dasarnya, dalam pendekatan pengelolaan sumber daya manusia pada masyarakat daerah, sangat dimungkinkan adanya partisipasi timbal balik dan otonom yang mengakibatkan reorientasi birokrasi pemerintah secara mendasar ke arah keterkaitan yang lebih efektif dengan masyarakat. Masyarakat daerah tentang rencana-rencana dan prioritas-prioritas proyek atau pembangunan yang akan diadakan, tetapi juga belajar untuk mendengar dari masyarakat tentang aspirasi, kekecewaan, dan harapan-harapan masyarakat itu sendiri. Pembangunan atau proyek yang berakar dari aspirasi dan harapan masyarakat sejatinya akan mampu untuk berkembang dalam kegiatan pembangunan tersebut. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang aktif, sangat memudahkan untuk pembangunan sumber daya manusia sehingga penanggulangan kemiskinan menjadi lebih efektif.¹⁵

Namun, dalam kenyataan dilapangan bahwa masyarakat miskin seringkali memiliki keterbatasan informasi dan akses terhadap program-program tersebut sehingga diperlukan adanya edukasi dan sosialisasi yang gencar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya bersama memerangi kemiskinan.

Kemudian yang terakhir adalah, faktor eksternal yang tidak terduga. Indonesia merupakan negara yang rentan terjadi bencana. Seringnya bencana atau bencana alam yang terjadi sehingga jumlah korban yang menyertainya menunjukkan tren kenaikan angka kemiskinan, dampak bencana seringkali memperburuk perekonomian dan kesejahteraan, namun terkadang juga beberapa jenis bencana malah menumbuhkan peningkatan ekonomi. Bila

¹⁵ Ahmand Zaki dan Diyan Yusri, "Mahar Perkawinan Dalam Hukum Islam," Jurnal Ilmu Pendidikan 7, no. 2 (2020): 5–6.

ditinjau dari durasi atau lama kondisi kemiskinannya, kemiskinan sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kemiskinan sementara dan kemiskinan kronis. Kemiskinan sementara cenderung bersifat lebih tentatif, pasalnya kemiskinan sementara ini bisa disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam dan krisis keuangan,

Adapun bila dilihat dari bencana kemarin yang terjadi di negara kita ialah Bencana pandemi COVID-19, pandemi tersebut dapat memperburuk kondisi kemiskinan di daerah, banyaknya masyarakat yang diberhentikan pekerjaannya, serta Pemda perlu memiliki strategi dan program khusus untuk menangani dampak kejadian eksternal ini terhadap masyarakat miskin seperti bantuan sosial dan program pemulihan ekonomi.

Oleh karena itu dari uraian diatas, untuk mengatasi berbagai rintangan ini membutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak, bukan hanya Pemerintahan daerah saja yang aktif dalam menanggulangi kemiskinan, namun diperlukannya juga sinergi dan kolaborasi antar instansi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan yang sangat rumit ini. Dengan strategi yang tepat, inovasi, dan komitmen yang kuat, diharapkan Pemerintahan dapat memainkan peran yang optimal dalam memberantas kemiskinan di wilayahnya dan mewujudkan masyarakat yang bahagia, sejahtera serta adil.

B.3 Penanggulangan Kemiskinan di Daerah

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan otonomi daerah setidaknya ada enam pilar yang harus dibangun pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan yakni : Pendidikan, Kesehatan, ekonomi, infrastruktur pelayanan publik, hukum, serta kelembagaan. Salah satu kebutuhan dasar Masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah adalah Pendidikan. Pendidikan merupakan langkah strategis terhadap komitmen yang memiliki jangka panjang. Mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20% merupakan amanat pemerintah yang sudah termaktub dalam amandemen UUD. Tidak bisa menyangkal bahwa pemerintah yang maju dan unggul sangatlah

memperhatikan permasalahan pendidikan. Maka dari itu dalam rangka menanggulangi kemiskinan membangun kualitas pendidikan merupakan agenda penting pemerintah daerah. Dengan memperbaiki kualitas pendidikan maka dapat meminimalisir lingkaran setan kemiskinan (*the vicious cycle of poverty*), pengaruh selanjutnya yaitu akan mengurangi kemiskinan di daerah-daerah dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.¹⁶

Rancangan selanjutnya yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat, hal ini menjadi tantangan berat bagi pemerintah daerah. David Osborne dan Ted Gaebler memberikan sepuluh prinsip untuk mewirauasakan pemerintahan, yaitu¹⁷:

1. Pemerintahan katalis (*Catalytic Govern mean: Steering Rather Than Rowing*).
2. Pemerintah milik masyarakat (*Community-Owned Government: Empowering Rather than Serving*).
3. Pemerintah yang kompetitif (*Competitive Government: Injecting Competition into Service Delivery*).
4. Pemerintah yang digerakkan oleh misi (*Mission-Driven Government: Transforming Rule-Driven Organizations*).
5. Pemerintah yang berorientasi hasil (*Results-Oriented Government: Funding Outcomes, Not Inputs*).
6. Pemerintah berorientasi pada pelanggan (*Customer-Driven Govern ment: Meeting the Needs of the Cus tomer, Not the Bureaucracy*).
7. Pemerintahan wirausaha (*Enterprising Government: Earning Rather Than Spending*).
8. Pemerintah antisipatif (*Anticipatory Government: Prevention Rather Than Cure*).
9. Pemerintah desentralisasi (*Decentralized Govenment: From Hierarchy to Participation and Teamwork*).

¹⁶ Muhammad and Mahmudi, "Tantangan Dan Peluang Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan."

¹⁷ Ibid

10. Pemerintah berorientasi pada (mekanisme) pasar (*Market-Oriented Government: Leveraging Change Through the Market*).

Di negara negara maju terutama di eropa muncul gerakan New Public Management, gerakan tersebut mendorong pemerintah untuk mengadopsi praktik dan gaya menejemen sektor bisnis ke dalam sektor publik. Entrepreneurship pemerintahan juga terkait dengan praktik dan gaya manajemen sektor bisnis yang harus diterapkan sektor publik. Apabila entrepreneurship diterapkan yang terjadi akan mengalami pergeseran dari *state centered* menuju *market centered*. Karena pemerintah diharuskan untuk menghasilkan daripada sekedar menghabiskan anggaran, entrepreneurship dalam pemerintahan daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat daerah.

Tidak hanya memperbaiki kualitas pendidikan dan ekonomi, pemerintah daerah juga turut serta memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat. Pendidikan, ekonomi atau pendapatan, dan kesehatan merupakan tiga hal kunci untuk mengatasi masalah kemiskinan di daerah. Kesehatan akan memengaruhi produktivitas masyarakat dan kualitas hidup mereka. Maka dari itu diperlukan peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan seperti puskesmas, tenaga medis, serta tenaga penyuluh.

Rancangan selanjutnya yaitu pemerintah daerah juga harus memperbaiki hukum, infrastruktur publik, dan kelembagaan untuk mendukung otonomi mereka. Apabila ketiga pilar tersebut tidak di terapkan dengan baik maka konsep-konsep pembangunan daerah tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan. Pelayanan publik yang diberikan pemerintah menentukan indikator kinerja sektor publik. Agar pemberian pelayanan publik berkualitas maka diperlukannya infrastruktur pelayanan publik yang memadai. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur pelayanan publik dengan mengacu standar minimal yang

ditentukan. Pemerintah daerah harus memiliki profesionalisme kelembagaan dan aturan hukum yang jelas untuk memberikan pelayanan publik terbaik.¹⁸

B.4 Strategi Pemerintah dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, strategi merupakan landasan awal bagi sebuah organisasi dan komponen elemen di dalamnya untuk menyusun langkah-langkah atau tindakan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Penyusunan strategi harus mempertimbangkan apa yang ingin dicapai dan tujuan apa yang akan dicapai. Strategi yang dikembangkan harus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu untuk memenuhi perubahan kondisi yang di timbulkan oleh lingkungan baik eksternal maupun internal. Strategi menurut pendapat Geoff Mulgan mengemukakan bahwa mengenai strategi yang diperuntukkan untuk organisasi pembuat kebijakan (pemerintah). Strategi ini berguna untuk mengatur kekuasaan dan sumber daya yang ada lewat organisasi publik dengan tujuan untuk kepentingan publik. Berdasarkan pengertian tersebut Goff Mulgan menyimpulkan bahwa strategi pemerintah ada lima yakni: *purposes* (Tujuan), *Environment* (lingkungan), *Direction* (Pengarahan), *Action* (Tindakan), *Learning* (Pembelajaran).¹⁹

Sebagaimana peraturan pemerintah dalam Negeri No. 11 Tahun 2018 tentang sistem pengembangan sumber daya manusia aparatur berbasis kompetensi di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan kerjasama seperti yang di maksud dalam pasal 66 permendagri No. 11 Tahun 2018, terkait dengan biaya penyelenggaraan sistem pengembangan sumber daya manusia menurut pasal 71 biaya bersumber dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (meliputi provinsi, kabupaten atau kota), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁸ Ibid h.107

¹⁹ Hesty Tambajong, dkk "Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Wilayah Perbatasan" 13, no. 1 (2024): 258–259.

Tujuan dari pengembangan Sumber Daya Manusia menurut Martoyo adalah untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi kerja dalam melaksanakan serta mencapai sasaran program-program kerja yang telah ditetapkan. Perbaikan kerja yang efektif dan efisien dapat dicapai dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap terhadap tugas-tugas yang dijalankan.²⁰

B.5 Program keluarga Harapan (PKH)

Sebagaimana peraturan menteri sosial republik indonesia No.1 Tahun 2018 tentang program Keluarga Harapan dibuat untuk memfasilitasi penyediaan program perlindungan sosial yang direncanakan dan ditargetkan serta berkelanjutan dalam bentuk keluarga harapan (PKH), dengan tujuan meminimalisir beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Penyaluran bantuan sosial PKH ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial ini dibagikan kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin yang rentan terhadap resiko sosial bantuan tersebut berupa uang.²¹

Adapun tujuan dari program keluarga harapan yaitu:

1. Membuat keluarga penerima manfaat berubah dan menjadi lebih mandiri dalam mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, yang akan meningkatkan kualitas hidup mereka.
2. Mengurangi biaya dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan akan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

B.6 Program pengentasan kemiskinan

²⁰ Hesty Tambajong, dkk, Op.Cit., h.259

²¹ Desika Dwidianti and Yulvia Chrisdiana, "Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan," *Jia Sandikta* IX, no. 14 (2023): 11–22.

Berdasarkan peraturan peratruran presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, ada 3 klaster program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah.²²:

1. Klaster I merupakan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang menangani kemiskinan dan terdiri dari program jamkesmas, program keluarga harapan, program bantuan langsung tunai, program bantuan siswa miskin (BSM), program beras untuk keluarga miskin (raskin)
2. Klaster II adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, dimana ada program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM).
3. Klaster III merupakan kelompok program untuk mengurangi kemiskinan yang berfokus pada pemberdayaan usaha mikro dan kecil, yang mana adanya program kredit usaha rakyat (KUR)

B.8 Peraturan terkait pengelolaan kawasan perbatasan

Dalam pasal 1 ayat (6) No.43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, Kawasan perbatasan merupakan bagian dari wilayah yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah darat indonesia dengan negara lain. Kawasan perbatasan dapat dihitung dari garis batas wilayah hingga ke tingkat kecamatan setempat. Maka dari itu dalam undang-undang kawasan perbatasan laut tidak termasuk dalam kawasan yang dimaksud.²³

Berdasarkan fakta tersebut, kawasan perbatasan indonesia berada di tiga pulau yakni, Kalimantan, Papua dan pulau Timor atau disebut Nusa Tenggara Timur. Di bagian utara pulau Kalimantan Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Di Nusa Tenggara Timur, Indonesia berbatasan langsung dengan negara yang sebelumnya bagian dari negara Timor Lesta.²⁴

²² Safuridar and Suci, "Analisis Dampak Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Kehidupan Masyarakat Miskin Di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur."

²³ Erlinda Matondang, "Arti Penting Pengelolaan Kwasan Perbatasan Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Nusa Tenggara Timur," 2013, 5-6.

²⁴ Ibid hlm 6

Nilai strategis yang ada di kawasan perbatasan pengelolannya dilakukan secara khusus oleh pemerintah karena daerah perbatasan rentan terhadap keutuhan negara. Pasal 1 ayat (11) UU No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyatakan bahwa badan pengelola yang dibentuk oleh pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola wilayah perbatasan.

Terkait dengan mengelola kawasan perbatasan. Tugas dari badan pengelola yaitu menetapkan kebijakan program pembangunan, mengkoordinasi pelaksanaan program, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, dan melaksanakan evaluasi serta pengawasan. Sedangkan pelaksanaan teknis pembangunan dilakukan oleh instansi teknis terkait.

Pemerintah pusat dan daerah mempunyai peranan penting dalam pengolahan kawasan perbatasan walaupun badan pengelolah sudah diberi kewenangan undang-undang, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 10 ayat (1a) UU No. 43 Tahun 2008, pemerintah pusat berwenang untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan, selain itu menetapkan anggaran pembangunan kawasan terbatas merupakan hal yang wajib bagi pemerintah pusat. Dalam penetapan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemegang utama dalam pengolahan daerah yaitu pemerintah daerah, termasuk juga kawasan perbatasan dalam lingkup wilayahnya. Maka dari itu pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, mempunyai peranan penting untuk mengelola kawasan perbatasan.²⁵

Selain membutuhkan peran pemerintah, partisipasi masyarakat juga diperlukan dan bersifat wajib sebagaimana pasal 19 UU No. 43 tahun 2008. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengembangkan pembangunan dan menjaga serta mempertahankan kawasan perbatasan. Selain itu, masyarakat diminta untuk berpartisipasi secara aktif dalam program yang dirancang pemerintah untuk membangun kawasan perbatasan.

²⁵ Ibid

C. Penutup

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi berbagai negara, termasuk Indonesia, yang dapat dikategorikan dalam bentuk kemiskinan relatif, absolut, kultural, dan struktural. Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh faktor alamiah maupun buatan. Kemiskinan juga merupakan masalah serius yang harus ditangani oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini didukung oleh regulasi yang mengatur hak-hak dasar bagi fakir miskin. Kemiskinan telah berdampak luas, mulai dari aspek kesehatan, pendidikan, tabungan, layanan publik, lapangan kerja, hingga stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Meskipun pemerintah pusat masih sangat dominan dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, pemerintah daerah dianggap lebih memahami kondisi lokal sehingga perlu dilibatkan lebih besar dalam mendesain dan mengembangkan kebijakan. Pemerintah daerah menghadapi beberapa tantangan dalam menanggulangi kemiskinan, seperti ketimpangan alokasi anggaran dan kesenjangan pembangunan ekonomi antarwilayah.

Untuk mengatasi kemiskinan di daerah, pemerintah daerah perlu membangun enam pilar utama yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Infrastruktur pelayanan public, Hukum, dan Kelembagaan Meningkatkan kualitas pendidikan karena dapat memutus lingkaran kemiskinan. Pemerintah wajib mengalokasikan minimal 20% anggaran untuk pendidikan. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pemerintah daerah disarankan menerapkan 10 prinsip pemerintahan kewirausahaan, seperti lebih katalis, kompetitif, berorientasi hasil, berorientasi pelanggan, dan berorientasi pasar. Perbaikan layanan kesehatan masyarakat juga penting dilakukan, seperti meningkatkan jumlah dan kualitas puskesmas serta tenaga medis. Pemerintah daerah juga harus fokus pada perbaikan kerangka hukum, infrastruktur publik, dan kapasitas kelembagaan untuk mendukung otonomi daerah dan pelayanan publik yang baik.

Di wilayah perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia, khususnya daerah Jangoi, terdapat beberapa faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu: Rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat terbatasnya akses dan fasilitas Pendidikan, Ketergantungan pada sumber daya alam tanpa didukung pengelolaan yang optimal, Tingginya laju pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan, Tingkat pengangguran yang tinggi, Perkembangan IPTEK yang menggantikan tenaga kerja manusia, Kebijakan pemerintah yang kurang optimal dalam pembangunan daerah perbatasan. Dampak kemiskinan di daerah perbatasan lebih dirasakan oleh perempuan dan anak-anak, terutama di wilayah perdesaan, akibat rendahnya sumber daya alam dan sumber daya manusia. Upaya pengentasan kemiskinan di daerah perbatasan membutuhkan strategi komprehensif dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengelola sumber daya alam secara optimal, serta mendorong pembangunan yang merata di wilayah perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, El. "Kemiskinan_Dan_Penyebabnya" 1, no. April (2020): 43–50.
- Anggun, and Nur Indah Sari. "Pengaruh Realisasi Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Daerah Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2022." *Ekodestinas* 2, no. 1 (2024): 17–35. <https://doi.org/10.59996/ekodestinas.v2i1.406>.
- Aziz, Gamal Abdul, Eny Rochaida, and Warsilan. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Kartanegara." *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen* 12, no. 1 (2016): 29–48.
- Dwidiandi, Desika, and Yulvia Chrisdiana. "Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan." *Jia Sandikta* IX, no. 14 (2023): 11–22.
- Fajry, Febriyanty. "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Maros." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 11, no. 2 (2018): 66–79.
- Marthalina, Marthalina. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten." *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 2018, 1–24. <https://doi.org/10.33701/jt.v10i1.403>.
- Matondang, Erlinda. "Arti Penting Pengelolaan Kawasan Perbatasan Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Nusa Tenggara Timur," 2013, 5–6.
- Muhammad, Fadel, and Mahmudi Mahmudi. "Tantangan Dan Peluang Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan." *Unisia* 29, no. 59 (2006): 99–110. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol29.iss59.art7>.
- Niko, Nikodemus. "KEMISKINAN SEBAGAI PENYEBAB STRATEGIS PRAKTIK HUMMAN TRAFFICKING DI KAWASAN PERBATASAN JAGOI BABANG (INDONESIA-MALAYSIA) KALIMANTAN BARAT," 2016, 515–24.
- Novandric, Motic Devianao. "Implementasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan" 2, no. 3 (2014): 1–10.

- Rupita, Rupita. “Kehidupan Perempuan Perbatasan: Kemiskinan Dan Eksploitasi (Kajian Kasus Di Perbatasan Jagoi Indonesia-Malaysia Kalimantan Barat).” *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2020): 135–45. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v3i1.429>.
- Safuridar, Safuridar, and Novera Dwi Suci. “Analisis Dampak Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Kehidupan Masyarakat Miskin Di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur.” *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 2 (2017): 725–35. <https://doi.org/10.33059/jseb.v8i2.430>.
- Suryawati, Chriswardani. “MEMAHAMI KEMISKINAN SECARA MULTIDIMENSIONAL.” *Proceedings - European Aviation Safety Seminar, EASS 08*, no. 03 (2010): 585–97.
- Susanti, Ervin Nora, and Sartiyah Sartiyah. “Determinan Kemiskinan Di Provinsi Kepulauan Riau.” *Jurnal Dimensi* 8, no. 2 (2019): 143–52. <https://doi.org/10.33373/dms.v8i2.2156>.
- Tambajong, Hesty. “Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Wilayah Perbatasan” 13, no. 1 (2024): 258–59.
- Yusri, Ahmand Zaki dan Diyan. “Mahar Perkawinan Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 809–20.